

KOMENTAR AKADEMIK

Indonesia Keluar dari Jebakan Kejahatan Ekonomi

Telaah Konseptual, Ekonometrika, dan Implikasi Kebijakan

Makalah asal: Johny Wenas Polii

Komentar oleh Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD

27 Juli 2026

Abstrak

Makalah “Indonesia Keluar dari Jebakan Kejahatan Ekonomi” mengangkat persoalan yang sangat relevan: hubungan antara kejahatan ekonomi, mutu kelembagaan, kredibilitas kebijakan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kekuatan utamanya terletak pada keberanian menghubungkan penegakan hukum dengan agenda makroekonomi, serta pada penggunaan data aktual sampai Juli 2026. Sebagian besar angka makro yang disebutkan dapat dikonfirmasi melalui sumber resmi. Namun, label “analisis ekonometrika” belum sepenuhnya didukung oleh metode dan hasil yang ditampilkan. Persamaan yang disajikan baru merupakan model konseptual; belum terdapat definisi operasional variabel, sumber dan struktur data, periode observasi, teknik estimasi, hasil koefisien, uji signifikansi, diagnostik model, ataupun strategi identifikasi kausal. Komentar ini menilai makalah secara konstruktif, membedakan antara argumen normatif, korelasi empiris, dan pembuktian ekonometrika. Ulasan juga mengusulkan perbaikan konsep “jebakan kejahatan ekonomi”, pengembangan mekanisme kausal, pemilihan desain panel provinsi atau deret waktu, pengukuran ekonomi ilegal melalui beberapa indikator, serta agenda kebijakan berbasis pencegahan, penindakan, pemulihan aset, digitalisasi, dan penguatan integritas institusi. Kesimpulan utama komentar ini adalah bahwa tesis makalah layak dipertahankan, tetapi klaim ilmiahnya perlu dibuat lebih terbatas atau metode empirisnya perlu diperluas secara substansial. Indonesia dapat keluar dari jebakan kejahatan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang tinggi, stabilitas rupiah, dan peringkat kredit yang baik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa jebakan tersebut telah melemah.

Kata kunci: kejahatan ekonomi, kelembagaan, ekonometrika, korupsi, investasi, pertumbuhan, tata kelola, Indonesia

1. Penilaian Umum dan Relevansi Makalah

Makalah karya Johny Wenas Polii ini merupakan opini kebijakan yang ringkas, aktual, dan mudah dipahami. Tesis dasarnya ialah bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk keluar dari berbagai bentuk kejahatan ekonomi melalui perpaduan kebijakan makroekonomi yang kredibel, penguatan institusi, dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam konteks Indonesia, tesis ini penting karena kejahatan ekonomi bukan sekadar penyimpangan hukum oleh individu. Ia dapat beroperasi sebagai sistem insentif yang menghubungkan pelaku usaha, pejabat, perantara politik, aparat penegak hukum, dan jaringan lintas negara. Dampaknya merembes dari kehilangan penerimaan negara sampai memburuknya kompetisi, dari rendahnya produktivitas sampai melemahnya kepercayaan warga terhadap negara.

Pilihan penulis untuk menempatkan variabel kelembagaan di dalam pembahasan makroekonomi patut diapresiasi. Terlalu banyak analisis pertumbuhan hanya berpusat pada investasi, konsumsi, ekspor, inflasi, dan suku bunga, seolah-olah seluruh transaksi berlangsung di dalam pasar yang bersih dan institusi yang netral. Makalah ini mengingatkan bahwa kualitas hukum menentukan siapa yang berani berinvestasi, jenis investasi apa yang masuk, berapa besar biaya transaksi yang harus ditanggung, dan apakah keuntungan berasal dari inovasi atau kedekatan dengan kekuasaan. Dalam pengertian itu, hukum bukan ornamen di luar ekonomi, melainkan bagian dari infrastruktur produktif.

Makalah juga memiliki nilai komunikatif. Persamaan yang sederhana membantu pembaca nonspesialis melihat bahwa pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh tata kelola, hukum, investasi, inflasi, suku bunga, dan pengendalian kejahatan ekonomi secara bersamaan. Lima agenda kebijakannya—penegakan hukum, digitalisasi pengawasan, investasi produktif berorientasi ekspor, independensi Bank Indonesia, dan

koordinasi kebijakan—mudah diingat. Untuk tulisan opini singkat, kejernihan seperti ini merupakan kelebihan.

Meski demikian, status ilmiah tulisan perlu ditempatkan secara tepat. Makalah ini lebih kuat sebagai esai konseptual berbasis indikator makro mutakhir daripada sebagai analisis ekonometrika. Ekonometrika bukan sekadar menuliskan persamaan dengan simbol alfa, beta, dan galat. Ekonometrika memerlukan data yang dapat direplikasi, metode estimasi yang sesuai, hasil numerik, pengujian asumsi, dan interpretasi yang berhati-hati. Karena unsur-unsur itu belum disediakan, pernyataan “pendekatan ekonometrika menunjukkan” terlalu kuat. Formulasi yang lebih akurat adalah “kerangka konseptual ekonometrika mengisyaratkan” atau “makalah mengajukan hipotesis yang dapat diuji secara ekonometrika”.

Pembedaan ini bukan kritik terminologis semata. Ia menentukan bobot kesimpulan. Jika tulisan dinyatakan sebagai opini, penulis berhak menyusun argumentasi normatif dan menggunakan beberapa fakta sebagai ilustrasi. Jika dinyatakan sebagai studi ekonometrika, pembaca berhak menanyakan jumlah observasi, spesifikasi model, kemungkinan endogenitas, ketahanan hasil, dan dasar inferensi kausal. Makalah sekarang berada di antara kedua genre tersebut. Perbaikan dapat dilakukan melalui salah satu dari dua jalur: mempertahankannya sebagai opini kebijakan dan mengurangi klaim metodologis, atau mengembangkannya menjadi penelitian ekonometrika yang lengkap.

2. Kekuatan Substantif Makalah

Kekuatan pertama adalah keluasan definisi kejahatan ekonomi. Penulis tidak membatasi masalah pada korupsi, tetapi mencakup penyelundupan, manipulasi perdagangan, pencucian uang, moral hazard fiskal, dan praktik rente. Cakupan ini tepat karena bentuk-bentuk tersebut saling berhubungan. Hasil korupsi dapat dicuci melalui perusahaan cangkang; manipulasi nilai perdagangan dapat memindahkan laba atau modal secara terselubung; penyelundupan dapat bertahan karena perlindungan aparat; dan moral hazard fiskal dapat muncul ketika keputusan publik memberikan keuntungan privat tanpa pertanggungjawaban yang memadai.

Kekuatan kedua adalah pengakuan terhadap efek tidak langsung. Makalah menyatakan bahwa variabel penegakan hukum dan pengendalian kejahatan ekonomi memengaruhi pertumbuhan melalui efisiensi belanja, kepastian investasi, pengawasan perdagangan, transparansi fiskal, dan kepercayaan pasar. Ini lebih tepat daripada membayangkan satu hubungan mekanis yang langsung. Misalnya, keberhasilan penindakan korupsi tidak otomatis menaikkan pertumbuhan pada triwulan yang sama. Dalam jangka pendek, penindakan bahkan dapat menunda proyek yang bermasalah atau menekan aktivitas pada sektor tertentu. Manfaat pertumbuhan muncul kemudian melalui alokasi sumber daya yang lebih baik, kompetisi yang lebih sehat, pemilihan proyek yang lebih produktif, dan penurunan premi risiko.

Kekuatan ketiga adalah penekanan pada bauran kebijakan. Makalah menyadari bahwa stabilitas rupiah tidak dapat dijaga hanya dengan suku bunga. Rilis Bank Indonesia pada Juli 2026 memang menunjukkan kombinasi kebijakan moneter, intervensi valas, insentif portofolio, pendalaman pasar uang dan valuta asing, kebijakan likuiditas makroprudensial, serta dukungan sistem pembayaran. Pandangan sistemik seperti ini berguna. Dalam ekonomi terbuka, kenaikan suku bunga dapat membantu stabilisasi kurs, tetapi juga membawa biaya bagi kredit, investasi, debitur, dan fiskal. Karena itu, kredibilitas institusi, komunikasi kebijakan, cadangan devisa, koordinasi fiskal-moneter, dan pendalaman pasar sama pentingnya.

Kekuatan keempat adalah aktualitas data. Angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026 sesuai dengan rilis BPS. Inflasi 3,34 persen secara tahunan pada Juni 2026 juga sesuai dengan rilis BPS. BI-Rate sebesar 5,75 persen yang dipertahankan pada Juli 2026 sesuai dengan keputusan Bank Indonesia. Defisit perdagangan Mei 2026 dan pemertahanan peringkat BBB/A-2 dengan prospek stabil oleh S&P juga memiliki dasar faktual. Penggunaan data terkini membuat tulisan responsif terhadap situasi nasional.

Kekuatan kelima adalah optimisme yang bersyarat. Penulis tidak menyatakan bahwa masalah telah selesai. Ia mengatakan bahwa peluang keluar semakin besar jika reformasi kelembagaan konsisten, disiplin fiskal dijaga, dan tata kelola diperbaiki. Optimisme bersyarat lebih produktif daripada pesimisme absolut yang menganggap kejahatan ekonomi sebagai budaya yang tidak dapat diubah. Institusi adalah hasil pilihan politik, desain organisasi, teknologi, profesionalisme, norma, dan penegakan. Karena itu, institusi dapat diperbaiki, meskipun perbaikannya memerlukan waktu dan menghadapi resistensi dari pihak yang menikmati rente.

3. Masalah Konseptual: Apa yang Dimaksud dengan “Jebakan”?

Istilah “jebakan kejahatan ekonomi” menarik, tetapi belum didefinisikan secara analitis. Sebuah negara dapat mengalami banyak kejahatan ekonomi tanpa berada dalam “jebakan”. Kata jebakan biasanya merujuk pada keseimbangan buruk yang menguatkan dirinya sendiri. Dalam jebakan semacam itu, kejahatan ekonomi melemahkan institusi; institusi yang lemah mengurangi probabilitas deteksi dan hukuman; rendahnya risiko hukuman meningkatkan keuntungan melakukan kejahatan; keuntungan ilegal kemudian dipakai untuk membeli perlindungan, pengaruh politik, atau legitimasi; dan siklus itu kembali melemahkan institusi.

Dengan definisi ini, keluar dari jebakan bukan berarti menghapus seluruh kejahatan ekonomi—tujuan yang tidak realistis—melainkan memindahkan sistem dari keseimbangan “kejahatan menguntungkan dan relatif aman” menuju keseimbangan “kepatuhan lebih menguntungkan dan pelanggaran berisiko tinggi”. Perubahan tersebut menuntut peningkatan probabilitas terdeteksi, kecepatan proses hukum, konsistensi hukuman, peluang pemulihan aset, perlindungan pelapor, dan pengurangan ruang diskresi yang tidak transparan. Pada saat yang sama, biaya kepatuhan bagi pelaku usaha yang jujur harus diturunkan. Negara tidak cukup menjadi lebih keras; negara harus menjadi lebih pasti, lebih sederhana, dan lebih adil.

Konsep jebakan juga perlu membedakan setidaknya empat tingkat. Pada tingkat mikro, terdapat keputusan individu atau perusahaan untuk menyuap, menggelapkan pajak, memalsukan dokumen, atau mencuci uang. Pada tingkat organisasi, terdapat prosedur dan budaya yang membiarkan atau mendorong penyimpangan. Pada tingkat jejaring, terdapat kolusi di antara aktor publik dan privat. Pada tingkat sistem, terdapat aturan politik-ekonomi yang memungkinkan keuntungan privat dari kebijakan publik. Intervensi yang hanya menasar individu tidak akan cukup bila mekanisme organisasi dan jaringan tetap utuh.

Makalah juga perlu membedakan kejahatan ekonomi dari kelemahan kebijakan. Defisit perdagangan, inflasi, depresiasi rupiah, dan kenaikan suku bunga bukan kejahatan ekonomi. Semua itu adalah kondisi atau hasil makro yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor legal, termasuk siklus global, harga komoditas, perang, cuaca, permintaan domestik, dan perubahan portofolio. Kejahatan ekonomi dapat

memperburuk kerentanan, tetapi hubungan tersebut harus dibuktikan. Tanpa perbedaan ini, pembaca dapat mengira bahwa seluruh tekanan ekonomi merupakan gejala kriminalitas, padahal tidak demikian.

Istilah “moral hazard fiskal” juga memerlukan kehati-hatian. Moral hazard adalah perubahan perilaku akibat perlindungan dari konsekuensi risiko. Tidak semua defisit, subsidi, penjaminan, atau proyek yang gagal merupakan kejahatan. Sebagian mungkin merupakan keputusan buruk, bias optimisme, keterbatasan informasi, atau konsekuensi ketidakpastian. Ia menjadi masalah integritas ketika terdapat konflik kepentingan, manipulasi, penyalahgunaan kewenangan, pengalihan risiko secara sengaja kepada publik, atau keuntungan privat yang tidak sah. Definisi operasional harus mencegah pencampuran antara tindak pidana, pelanggaran administratif, kebijakan yang tidak efektif, dan risiko ekonomi biasa.

Lebih jauh, variabel COR dalam persamaan didefinisikan sebagai “pengendalian kejahatan ekonomi”, bukan tingkat kejahatan ekonomi. Jika nilai COR yang lebih tinggi berarti pengendalian lebih baik, koefisien yang diharapkan positif. Namun singkatan COR mudah dibaca sebagai corruption, yang biasanya meningkat ketika korupsi memburuk dan karenanya diharapkan berkoefisien negatif. Ambiguitas arah skala ini harus dihilangkan. Nama seperti ECONCRIME, CONTROL, atau INTEGRITY disertai definisi skala akan lebih aman.

4. Evaluasi atas Klaim Data Makro 2026

Data aktual yang dipilih makalah pada umumnya benar, tetapi interpretasinya perlu dibuat lebih seimbang. Pertumbuhan 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026 menunjukkan resiliensi, tetapi rilis BPS juga mencatat kontraksi 0,77 persen dibandingkan triwulan IV-2025. Selain itu, komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tahunan tertinggi adalah konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen. Fakta ini tidak membatalkan kinerja pertumbuhan, tetapi menunjukkan pentingnya membaca komposisi dan basis perbandingan. Pertumbuhan yang ditopang konsumsi pemerintah memiliki implikasi berbeda dari pertumbuhan yang terutama berasal dari produktivitas, investasi swasta, atau ekspor bernilai tambah tinggi.

Inflasi tahunan Juni 2026 sebesar 3,34 persen masih berada di dalam sasaran $2,5 \pm 1$ persen, tetapi dekat batas atas 3,5 persen. Inflasi inti sebesar 2,76 persen lebih moderat, sedangkan tekanan harga bergejolak dan harga yang diatur pemerintah perlu dicermati. Karena itu, kalimat “inflasi masih berada di sekitar rentang sasaran” sebaiknya dibuat presisi menjadi “masih berada dalam rentang sasaran, tetapi mendekati batas atas”. Perbedaan satu kata penting untuk komunikasi kebijakan.

Pada perdagangan, makalah benar bahwa Mei 2026 mencatat defisit pertama setelah rangkaian surplus bulanan yang panjang. Namun, data Bank Indonesia menyebut defisit Mei sekitar US\$1,61 miliar, sementara kumulatif Januari–Mei 2026 masih surplus sekitar US\$4,03 miliar. Dengan demikian, satu bulan defisit adalah sinyal kewaspadaan, bukan bukti bahwa posisi eksternal Indonesia telah berubah menjadi defisit struktural. Analisis yang kuat perlu memisahkan data bulanan yang volatil dari kecenderungan kumulatif dan struktur migas-nonmigas.

Peringkat S&P BBB/A-2 dengan prospek stabil memang menunjukkan bahwa lembaga pemeringkat masih melihat kemampuan dan kemauan negara memenuhi kewajiban keuangannya secara memadai. Akan tetapi, peringkat kredit bukan ukuran langsung keberhasilan pemberantasan kejahatan ekonomi. Peringkat dipengaruhi oleh pertumbuhan, kebijakan fiskal, posisi eksternal, kualitas moneter, struktur

utang, dan risiko kelembagaan secara keseluruhan. Ia dapat menjadi indikator tidak langsung kredibilitas negara, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai bukti spesifik bahwa korupsi, penyelundupan, atau pencucian uang telah menurun.

Demikian pula, stabilisasi rupiah melalui bauran kebijakan menunjukkan kapasitas Bank Indonesia, tetapi tidak menguji koefisien *LAW* atau *COR* dalam persamaan. Kasus tersebut mendukung argumen lebih umum bahwa institusi yang kredibel membantu stabilitas. Agar terhubung dengan tesis kejahatan ekonomi, penulis perlu menunjukkan mekanisme yang lebih dekat, misalnya bagaimana peningkatan kualitas pelaporan devisa hasil ekspor, pengawasan beneficial ownership, penindakan manipulasi perdagangan, atau pencegahan aliran keuangan ilegal memperkuat pasar valas dan penerimaan negara.

Kelemahan paling penting adalah masalah inferensi. Dari fakta bahwa pertumbuhan kuat, inflasi terkendali, BI kredibel, dan peringkat stabil, tidak dapat langsung disimpulkan bahwa Indonesia sedang keluar dari jebakan kejahatan ekonomi. Negara dapat mencatat pertumbuhan tinggi sekaligus memiliki rente dan korupsi yang signifikan, terutama saat harga komoditas atau belanja pemerintah mendukung aktivitas. Sebaliknya, penindakan kejahatan yang efektif dapat bertepatan dengan perlambatan jangka pendek akibat penghentian aktivitas ilegal. Karena itu, indikator makro harus dipadukan dengan indikator penegakan dan integritas.

5. Mengapa Model yang Disajikan Belum Menjadi Analisis Ekonometrika

Model $GDP = \alpha + \beta_1 GOV + \beta_2 LAW + \beta_3 INV + \beta_4 INF + \beta_5 INT + \beta_6 COR + \varepsilon$ adalah awal yang berguna, tetapi belum dapat disebut hasil ekonometrika. Pertama, variabel dependen tidak konsisten. Simbol *GDP* dapat berarti tingkat PDB riil, logaritma PDB, PDB per kapita, atau laju pertumbuhan PDB. Penjelasan menyebut pertumbuhan ekonomi, sehingga notasi yang lebih tepat adalah *GROWTH*. Pilihan bentuk ini menentukan interpretasi koefisien dan sifat statistik data.

Kedua, unit analisis dan dimensi waktu tidak disebutkan. Apakah model menggunakan data nasional tahunan, nasional triwulanan, panel provinsi tahunan, panel negara ASEAN, atau data perusahaan? Jika hanya memakai informasi Q1 sampai 23 Juli 2026, jumlah observasi tidak memadai untuk mengestimasi enam variabel penjelas. Bahkan data bulanan selama tujuh bulan pun terlalu sedikit, sementara PDB hanya tersedia triwulanan. Pernyataan “bukti empiris Q1–23 Juli 2026” lebih tepat disebut pemantauan indikator terkini, bukan sampel ekonometrika.

Ketiga, frekuensi data tidak selaras. Inflasi dan suku bunga tersedia bulanan, PDB triwulanan, sedangkan tata kelola, efektivitas hukum, dan indeks pengendalian korupsi lazimnya tahunan. Menggabungkannya tanpa strategi temporal akan menciptakan pengulangan nilai tahunan atau observasi semu. Penulis perlu memilih desain yang konsisten. Panel provinsi tahunan selama, misalnya, 2010–2025 dapat memberi banyak observasi dan variasi lintas wilayah. Alternatifnya, studi lintas negara ASEAN dengan periode panjang dapat menggunakan indikator kelembagaan tahunan, meskipun fokus Indonesia menjadi komparatif.

Keempat, tidak ada definisi operasional. *GOV* dapat diukur dengan Government Effectiveness dari Worldwide Governance Indicators, indeks SPBE, opini audit, kualitas pelayanan, atau indikator lokal. *LAW* dapat menggunakan Rule of Law, waktu penyelesaian perkara, tingkat eksekusi putusan, atau probabilitas

penghukuman. COR dapat berupa Control of Corruption, jumlah kasus, kerugian negara, pemulihan aset, laporan transaksi mencurigakan, atau indeks persepsi. Masing-masing mengukur hal berbeda dan memiliki bias berbeda.

Jumlah kasus yang ditangani, misalnya, dapat meningkat karena kejahatan memburuk atau karena penegakan membaik. Nilai kerugian negara yang terungkap dapat naik akibat pengawasan lebih efektif, bukan akibat lebih banyak kejahatan. Indeks persepsi berubah perlahan dan dipengaruhi persepsi responden. Karena kejahatan tersembunyi tidak dapat diamati secara langsung, penggunaan satu indikator sangat berisiko. Pendekatan indeks laten atau triangulasi beberapa indikator akan lebih kuat.

Kelima, terdapat kemungkinan multikolinearitas konseptual antara GOV, LAW, dan COR. Indikator Government Effectiveness, Rule of Law, dan Control of Corruption dari sumber yang sama sering berkorelasi tinggi. Memasukkan ketiganya sekaligus dapat memperbesar galat baku dan membuat tanda koefisien tidak stabil. Peneliti perlu memeriksa matriks korelasi dan variance inflation factor, atau membentuk indeks kelembagaan gabungan dengan analisis komponen utama.

Keenam, endogenitas sangat serius. Investasi dapat meningkatkan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan juga menarik investasi. Institusi yang baik dapat meningkatkan pendapatan, sementara negara yang lebih kaya memiliki sumber daya lebih besar untuk membangun institusi. Kejahatan ekonomi dapat menekan pertumbuhan, tetapi perlambatan, pengangguran, atau tekanan fiskal juga dapat mengubah insentif kriminal dan politik penegakan. Estimasi ordinary least squares sederhana berpotensi bias karena kausalitas dua arah, variabel terlewat, dan kesalahan pengukuran.

Ketujuh, model belum memasukkan struktur dinamis. Dampak suku bunga, reformasi hukum, dan investasi memiliki jeda waktu. Inflasi dan pertumbuhan juga persisten. Model yang realistis perlu mempertimbangkan variabel dependen tertunda dan lag dari variabel kebijakan. Dalam panel, dynamic panel generalized method of moments dapat dipertimbangkan dengan kehati-hatian. Dalam deret waktu, ARDL atau vector error correction model mungkin relevan tergantung sifat stasioneritas dan kointegrasi. Pemilihan metode harus mengikuti pertanyaan dan karakter data, bukan sekadar popularitas alat.

Kedelapan, tidak ada hasil estimasi. Analisis ekonometrika minimal perlu menampilkan koefisien, standard error, statistik uji, nilai p atau interval kepercayaan, ukuran kecocokan model, jumlah observasi, dan diagnostik. Uji heteroskedastisitas, autokorelasi, ketergantungan lintas unit, stasioneritas, serta stabilitas spesifikasi mungkin diperlukan. Yang lebih penting, signifikansi statistik harus dibedakan dari signifikansi ekonomi. Koefisien yang kecil dapat signifikan pada sampel besar tetapi tidak penting secara kebijakan.

Kesembilan, kalimat bahwa LAW dan COR memiliki “efek tidak langsung” tidak sesuai dengan persamaan yang menempatkannya langsung di sisi kanan. Jika efek yang dimaksud melalui investasi atau kepercayaan, model mediasi perlu dinyatakan. Contohnya: kualitas hukum memengaruhi investasi; investasi kemudian memengaruhi pertumbuhan. Efek total dapat diuraikan menjadi efek langsung dan tidak langsung. Tanpa persamaan investasi atau pendekatan structural equation modelling, klaim mediasi belum diuji.

Kesepuluh, belum ada strategi falsifikasi. Hipotesis yang baik harus memungkinkan kemungkinan ditolak. Apa bukti yang akan membuat penulis menyimpulkan bahwa pengendalian kejahatan ekonomi tidak berdampak, berdampak kecil, atau bahkan menimbulkan biaya transisi? Tanpa kriteria itu, model berisiko hanya mengonfirmasi keyakinan normatif yang sejak awal dianggap benar.

6. Desain Penelitian yang Lebih Kuat

Pilihan paling realistis untuk memperkuat makalah adalah panel provinsi. Variabel dependen dapat berupa pertumbuhan PDRB riil per kapita atau produktivitas tenaga kerja provinsi. Variabel utama integritas dapat dibentuk dari kombinasi temuan audit, tindak lanjut rekomendasi, transparansi pengadaan, kepatuhan pelaporan, indikator pelayanan publik, dan ukuran penegakan yang telah dinormalisasi. Variabel kontrol dapat mencakup investasi, tingkat pendidikan, urbanisasi, struktur industri, belanja modal, keterbukaan perdagangan daerah, infrastruktur, inflasi daerah, dan efek guncangan nasional.

Model dasar dapat ditulis:

$$\text{Growth}_{it} = \alpha + \beta \text{Integrity}_{i,t-1} + \gamma \text{Investment}_{it} + \delta X_{it} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{it}$$

Subskrip i menunjukkan provinsi dan t menunjukkan tahun. Efek tetap provinsi μ_i mengendalikan karakteristik yang relatif konstan, seperti geografi atau sejarah kelembagaan, sedangkan efek tetap tahun τ_t menangkap guncangan nasional. Integritas diberi lag untuk mengurangi simultanitas dan karena reformasi membutuhkan waktu. Standard error sebaiknya dikelompokkan pada tingkat provinsi.

Namun, efek tetap dan lag belum sepenuhnya menyelesaikan endogenitas. Desain kuasi-eksperimental akan lebih meyakinkan. Jika terdapat reformasi digital pengadaan, perubahan sistem pajak, penerapan beneficial ownership, pembentukan unit penegakan khusus, atau kebijakan transparansi yang dilaksanakan pada waktu berbeda antarwilayah, difference-in-differences dapat digunakan. Asumsi tren paralel harus diuji, dan event study dapat menunjukkan dinamika sebelum dan sesudah kebijakan.

Untuk menganalisis perdagangan ilegal, data mirror statistics dapat membandingkan nilai ekspor yang dilaporkan Indonesia dengan impor yang dilaporkan negara mitra, setelah penyesuaian biaya dan jeda. Selisih bukan otomatis bukti kejahatan, tetapi pola anomali yang persisten dapat menjadi indikator risiko salah faktur perdagangan. Data kepabeanan mikro, bila tersedia secara aman, dapat dianalisis dengan deteksi anomali pada harga satuan, klasifikasi barang, negara transit, dan jaringan perusahaan.

Untuk pencucian uang, indikator dapat mencakup laporan transaksi keuangan mencurigakan, hasil analisis dan pemeriksaan yang diteruskan, penyitaan dan pemulihan aset, waktu penyelesaian, serta kesesuaian beneficial ownership. Sekali lagi, lebih banyak laporan dapat berarti pengawasan membaik. Karena itu, fokus harus pada rantai hasil: deteksi, investigasi, penuntutan, putusan, pemulihan aset, dan pencegahan pengulangan.

Jika penulis tetap ingin memakai data nasional, rentang waktu harus diperpanjang. Data tahunan selama beberapa dekade lebih sesuai bagi indikator kelembagaan, tetapi jumlah observasi tetap terbatas dan banyak perubahan struktural terjadi. Model ARDL dapat mengeksplorasi hubungan jangka pendek dan panjang bila derajat integrasi memenuhi syarat. Structural break perlu diuji di sekitar krisis Asia, krisis keuangan global, pandemi, perubahan rezim kebijakan, dan guncangan komoditas. Kesimpulan kausal harus tetap konservatif.

Pilihan lain ialah synthetic control atau interrupted time series untuk mengevaluasi reformasi tertentu. Namun, istilah “keluar dari jebakan” terlalu luas untuk satu regresi agregat. Penelitian lebih baik memecahnya menjadi pertanyaan yang dapat diuji: apakah digitalisasi pengadaan mengurangi harga berlebih? Apakah pertukaran data perpajakan meningkatkan kepatuhan? Apakah pengungkapan

beneficial owner meningkatkan pemulihan aset? Apakah kepastian penanganan sengketa meningkatkan investasi manufaktur? Jawaban atas pertanyaan spesifik dapat disatukan menjadi narasi sistemik.

Makalah juga perlu menetapkan indikator keberhasilan sebelum analisis. Keberhasilan sebaiknya tidak hanya diukur dari jumlah penangkapan. Indikator yang lebih lengkap mencakup penurunan celah penerimaan, peningkatan persaingan dalam tender, penurunan konsentrasi pemenang yang tidak wajar, kenaikan pemulihan aset, pemendekan waktu perkara, penurunan pengulangan pelanggaran, kenaikan investasi produktif, dan peningkatan kepercayaan pelaku usaha. Dengan indikator hasil seperti ini, penegakan hukum terhubung lebih jelas dengan ekonomi.

7. Pendalaman Mekanisme Ekonomi

Makalah akan lebih kuat jika menjelaskan bagaimana kejahatan ekonomi memengaruhi pertumbuhan. Mekanisme pertama adalah misalokasi. Korupsi dan rente mengalihkan modal, izin, kontrak, dan kredit dari pelaku yang paling produktif kepada pelaku yang memiliki akses. Akibatnya, tingkat investasi nominal dapat tinggi sementara produktivitas modal rendah. Karena itu, INV tidak selalu cukup; kualitas investasi harus diperhatikan.

Mekanisme kedua adalah biaya transaksi dan ketidakpastian. Suap yang “terprediksi” tetap merupakan biaya, tetapi penegakan selektif dan aturan yang berubah-ubah menciptakan ketidakpastian tambahan. Perusahaan produktif mungkin memilih skala kecil, sektor informal, atau yurisdiksi lain. Sebaliknya, perusahaan yang unggul dalam relasi politik tumbuh bukan karena inovasi, melainkan proteksi. Struktur industri menjadi kurang dinamis.

Mekanisme ketiga adalah erosi kapasitas fiskal. Penggelapan pajak, manipulasi perdagangan, penyelundupan, dan pengadaan yang dikorupsi mengurangi sumber daya atau nilai yang diperoleh negara. Pemerintah kemudian menghadapi pilihan antara menambah utang, menaikkan pajak pada basis yang patuh, mengurangi layanan, atau menerima kualitas belanja yang rendah. Semua pilihan memiliki konsekuensi distribusional dan pertumbuhan.

Mekanisme keempat adalah kompetisi tidak sehat. Pelaku yang mematuhi standar, membayar pajak, dan melindungi pekerja kalah harga dari pelaku yang menyelundup, memalsukan, atau membeli perlindungan. Dalam jangka panjang, pasar menghukum integritas. Jika hal ini terus berlangsung, norma usaha bergeser: pelanggaran tidak lagi dilihat sebagai penyimpangan, tetapi syarat bertahan. Inilah inti jebakan.

Mekanisme kelima adalah ketimpangan dan legitimasi. Kejahatan ekonomi tingkat tinggi biasanya memberi manfaat besar kepada kelompok dengan akses, sedangkan biayanya tersebar kepada masyarakat dalam bentuk harga, pajak, kerusakan lingkungan, layanan buruk, atau utang publik. Ketika warga melihat hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kepatuhan sukarela menurun. Negara kemudian harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memaksa kepatuhan, sehingga kontrak sosial melemah.

Mekanisme keenam adalah aliran keuangan ilegal. Keuntungan yang dipindahkan atau dicuci di luar negeri mengurangi basis pembiayaan domestik dan memperbesar kerentanan eksternal. Tetapi pengukurannya sulit. Karena itu, penulis perlu menghindari angka bombastis tanpa metodologi transparan. Estimasi harus disajikan sebagai rentang dengan asumsi, bukan sebagai nilai pasti.

Mekanisme ketujuh adalah kerusakan lingkungan. Kejahatan kehutanan, pertambangan ilegal, perikanan ilegal, dan manipulasi izin menghasilkan PDB pada tahap ekstraksi, tetapi mengurangi kekayaan alam dan menimbulkan biaya sosial. Pertumbuhan PDB dapat terlihat positif sementara kekayaan bersih nasional memburuk. Analisis “keluar dari jebakan” sebaiknya mempertimbangkan produktivitas, distribusi, dan keberlanjutan, bukan hanya laju PDB.

8. Implikasi Kebijakan: Dari Daftar Umum ke Arsitektur Reformasi

Lima agenda penulis tepat sebagai arah, tetapi perlu disusun menjadi arsitektur kebijakan. Pilar pertama adalah pencegahan. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur, membatasi diskresi tanpa jejak digital, membuka data kontrak, memperkuat pengadaan elektronik, dan menerapkan analitik risiko. Pencegahan yang baik mengurangi peluang pelanggaran sebelum kerugian terjadi.

Pilar kedua adalah deteksi. Integrasi data perpajakan, kepabeanan, perbankan, pengadaan, perizinan, pertanahan, dan beneficial ownership dapat membantu menemukan ketidaksesuaian. Namun, integrasi harus disertai tata kelola data, keamanan siber, audit algoritma, batas akses, dan mekanisme koreksi. Digitalisasi bukan sinonim integritas. Sistem digital dapat memperbesar pengawasan, tetapi juga dapat memusatkan kekuasaan atau memindahkan manipulasi ke dalam desain algoritma.

Pilar ketiga adalah penindakan yang pasti dan independen. Efek jera lebih dipengaruhi probabilitas deteksi dan kepastian konsekuensi daripada berat hukuman di atas kertas. Koordinasi antarpenghak hukum penting, tetapi koordinasi tidak boleh menghapus saling kontrol. Kejelasan yurisdiksi, profesionalisme penyidik dan penuntut, kualitas pembuktian keuangan, perlindungan saksi, serta transparansi perkembangan perkara perlu diperkuat.

Pilar keempat adalah pemulihan aset. Penjara tanpa pengembalian hasil kejahatan dapat meninggalkan insentif ekonomi bagi jaringan pelaku. Fokus harus mencakup pelacakan, pembekuan, penyitaan, pengelolaan aset, perampasan sesuai hukum, dan kerja sama internasional. Kinerja perlu diukur bukan hanya dari nilai putusan, tetapi dari aset yang benar-benar kembali dan digunakan secara akuntabel.

Pilar kelima adalah perbaikan kompetisi dan regulasi. Banyak rente lahir dari izin langka, pembatasan yang tidak perlu, monopoli, atau regulasi yang dapat dinegosiasikan. Penegakan pidana harus berjalan bersama reformasi regulasi dan kebijakan persaingan. Jika sumber rente dibiarkan, jaringan lama dapat digantikan jaringan baru.

Pilar keenam adalah integritas politik dan birokrasi. Kejahatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari biaya politik, konflik kepentingan, pintu putar antara regulator dan industri, serta sistem promosi birokrasi. Pelaporan kekayaan, aturan konflik kepentingan, transparansi pembiayaan politik, meritokrasi, rotasi pada posisi berisiko, dan perlindungan bagi pejabat yang menolak intervensi merupakan bagian kebijakan ekonomi, bukan sekadar etika administratif.

Pilar ketujuh adalah kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Pelapor internal, jurnalis investigasi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, auditor, asosiasi profesi, dan perusahaan yang patuh menyediakan informasi yang tidak dimiliki negara. Perlindungan terhadap pelapor dan kebebasan memperoleh informasi membantu mengubah asimetri informasi. Bagi dunia usaha, program kepatuhan perlu diarahkan pada beneficial ownership, pihak ketiga, konflik kepentingan, dan rantai pasok, bukan hanya dokumen formal.

Pilar kedelapan adalah evaluasi independen. Setiap reformasi harus memiliki teori perubahan, baseline, target, jadwal, dan data terbuka sejauh aman. Pemerintah perlu bersedia menerima hasil bahwa program tertentu tidak efektif. Tanpa evaluasi, digitalisasi dapat menjadi proyek teknologi mahal, penindakan menjadi produksi statistik kasus, dan koordinasi menjadi rapat tanpa hasil.

Kebijakan makro tetap penting, tetapi hubungannya dengan pemberantasan kejahatan harus dijelaskan. Independensi Bank Indonesia menjaga kredibilitas moneter; disiplin fiskal mengurangi ruang pembiayaan tidak transparan; pasar valuta asing yang dalam mengurangi kerentanan; dan investasi ekspor bernilai tambah memperkuat devisa. Namun, kebijakan tersebut tidak menggantikan reformasi hukum. Stabilitas makro menyediakan lingkungan, sedangkan integritas menentukan kualitas alokasi di dalamnya.

9. Usulan Perbaikan Struktur Makalah

Judul dapat dipertahankan karena kuat secara komunikatif, tetapi subjudul “Analisis Ekonometrika” sebaiknya diganti sementara menjadi “Kerangka Konseptual dan Tinjauan Indikator Makroekonomi 2026”. Jika estimasi lengkap ditambahkan, subjudul ekonometrika dapat digunakan kembali. Perubahan kecil ini meningkatkan kejujuran akademik tanpa mengurangi pesan utama.

Abstrak perlu menyebutkan jenis tulisan, sumber data, periode, metode, dan batas kesimpulan. Pendahuluan sebaiknya memuat definisi “jebakan”, pertanyaan penelitian, dan kontribusi. Tinjauan pustaka perlu menghubungkan institusi, korupsi, ekonomi bayangan, investasi, dan pertumbuhan. Bagian metode harus memuat unit analisis, sumber data, definisi variabel, hipotesis bertanda, teknik estimasi, serta uji ketahanan.

Bagian hasil harus memisahkan statistik deskriptif dari estimasi. Tabel deskriptif dapat memperlihatkan rerata, simpangan baku, minimum, maksimum, dan korelasi. Tabel regresi perlu menampilkan beberapa spesifikasi: model dasar, tambahan kontrol, efek tetap, lag, dan uji ketahanan. Jika instrumen digunakan, validitas dan kekuatannya harus dilaporkan. Grafik koefisien dengan interval kepercayaan dapat membantu pembaca.

Bagian diskusi tidak cukup menyatakan tanda koefisien. Penulis perlu menjelaskan besaran efek. Misalnya, apakah peningkatan satu simpangan baku indeks integritas berkaitan dengan tambahan pertumbuhan 0,1 atau 1 poin persentase? Apakah efek muncul setelah satu, dua, atau lima tahun? Apakah berbeda antara provinsi berbasis sumber daya dan manufaktur? Pertanyaan heterogenitas dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tajam.

Bagian data 2026 sebaiknya menjadi konteks, bukan bukti utama kausalitas. Data resmi perlu diberi tanggal rilis dan sumber. Narasi harus mencatat bahwa pertumbuhan tahunan 5,61 persen berjalan bersama kontraksi triwulanan 0,77 persen; inflasi 3,34 persen berada dalam sasaran tetapi dekat batas atas; dan defisit Mei terjadi saat kumulatif Januari–Mei masih surplus. Penyajian berpasangan seperti ini mencegah optimisme selektif.

Kesimpulan perlu menurunkan tingkat kepastian. Kalimat “pendekatan ekonometrika menunjukkan” dapat diubah menjadi “kerangka yang diajukan konsisten dengan literatur bahwa kualitas institusi berpotensi memperkuat investasi dan pertumbuhan, tetapi pengujian ekonometrika lebih lanjut diperlukan”. Ini bukan pelemahan pesan, melainkan penguatan kredibilitas.

10. Rumusan Tesis yang Lebih Presisi

Tesis makalah dapat dirumuskan kembali sebagai berikut: Indonesia memiliki kapasitas untuk mengurangi kejahatan ekonomi apabila reformasi meningkatkan kepastian deteksi dan konsekuensi, mengurangi keuntungan rente, memulihkan aset, memperbaiki kepatuhan, serta menjaga stabilitas makro. Dampak reformasi terhadap pertumbuhan berlangsung melalui peningkatan kualitas investasi, efisiensi fiskal, persaingan, produktivitas, dan kepercayaan. Besaran dan arah dampak tersebut harus diuji dengan data yang memisahkan perubahan nyata dalam kejahatan dari perubahan intensitas penegakan.

Rumusan ini lebih kuat karena tidak menyamakan pertumbuhan dengan integritas. Pertumbuhan adalah salah satu hasil akhir, sedangkan keluarnya negara dari jebakan harus terlihat pula pada perilaku dan institusi. Negara dianggap bergerak keluar apabila keuntungan yang diharapkan dari kejahatan turun, kepatuhan menjadi lebih mudah, impunitas berkurang, kompetisi membaik, aset dipulihkan, dan kebijakan tidak mudah dibajak.

Perlu pula diakui adanya biaya transisi. Penutupan tambang ilegal, penghentian impor manipulatif, pembatalan proyek koruptif, atau pembekuan aset dapat mengurangi aktivitas ekonomi terukur dalam jangka pendek. Jika evaluasi hanya memakai PDB satu triwulan, reformasi dapat terlihat “merugikan”, padahal kualitas pertumbuhan membaik. Horizon waktu dan indikator kesejahteraan perlu diperluas.

Pada sisi lain, reformasi dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik melalui penegakan selektif. Karena itu, keberhasilan bukan sekadar banyaknya tersangka, tetapi kesetaraan di depan hukum, transparansi proses, kualitas pembuktian, independensi lembaga, dan perlindungan hak. Pemberantasan kejahatan ekonomi harus memperkuat negara hukum, bukan memperluas kekuasaan tanpa kontrol.

11. Kesimpulan Akhir

Makalah “Indonesia Keluar dari Jebakan Kejahatan Ekonomi” memiliki intuisi kebijakan yang benar dan penting: ekonomi yang sehat tidak dapat dibangun hanya dengan suku bunga, investasi, atau pertumbuhan, melainkan membutuhkan institusi yang mampu menegakkan aturan dan mengendalikan rente. Penulis berhasil menyampaikan hubungan tersebut secara ringkas dan menggunakan indikator 2026 yang pada pokoknya sesuai dengan sumber resmi.

Keterbatasan utamanya terletak pada jarak antara label metodologis dan bukti yang disajikan. Persamaan regresi belum diestimasi; variabel belum dioperasionalkan; data dan unit analisis belum ditentukan; masalah endogenitas, frekuensi, multikolinearitas, lag, dan kesalahan pengukuran belum ditangani; dan tidak ada koefisien maupun uji statistik. Oleh sebab itu, tulisan saat ini belum membuktikan hipotesis secara ekonometrika. Ia mengajukan hipotesis yang masuk akal dan didukung literatur serta ilustrasi makro.

Data 2026 juga harus dibaca secara berimbang. Pertumbuhan tahunan 5,61 persen merupakan capaian penting, tetapi komposisi dan kontraksi triwulanan perlu dicatat. Inflasi 3,34 persen masih dalam sasaran, tetapi mendekati batas atas. Defisit perdagangan Mei merupakan sinyal, tetapi kumulatif lima bulan masih surplus. Peringkat kredit stabil menunjukkan kredibilitas umum, bukan ukuran langsung penurunan kejahatan ekonomi. Ketepatan interpretasi ini penting agar argumen tidak terjebak dalam seleksi data yang terlalu optimistis.

Secara normatif, kesimpulan penulis patut didukung: Indonesia dapat keluar dari jebakan kejahatan ekonomi. Namun, “keluar” harus didefinisikan sebagai perubahan keseimbangan institusional, bukan hilangnya semua pelanggaran. Negara perlu membuat kepatuhan lebih murah, pelanggaran lebih mudah terdeteksi, konsekuensi lebih pasti, pemulihan aset lebih efektif, dan pengambilan kebijakan lebih tahan terhadap pembajakan kepentingan.

Reformasi harus menggabungkan pencegahan, deteksi berbasis data, penindakan independen, pemulihan aset, perbaikan kompetisi, integritas politik-birokrasi, partisipasi masyarakat, dan evaluasi. Teknologi penting, tetapi bukan pengganti integritas. Stabilitas makro penting, tetapi bukan bukti tunggal keberhasilan hukum. Pertumbuhan penting, tetapi kualitas, distribusi, dan keberlanjutannya menentukan apakah kemajuan itu nyata.

Dengan revisi konseptual dan metodologis, makalah ini dapat berkembang dari opini singkat menjadi kontribusi akademik yang bernilai. Langkah paling mendesak adalah memilih genre secara tegas. Jika tetap sebagai opini, klaim ekonometrika perlu dilunakkan dan rujukan ditambahkan. Jika menjadi penelitian, penulis perlu membangun basis data, menetapkan desain identifikasi, melaporkan hasil estimasi, dan menguji ketahanan kesimpulan. Dalam kedua jalur tersebut, gagasan sentralnya tetap relevan: pembangunan ekonomi Indonesia pada akhirnya adalah proyek membangun produktivitas sekaligus membangun kepercayaan.

12. Peta Jalan Implementasi dan Agenda Penelitian

Sebagai penutup operasional, gagasan makalah dapat diterjemahkan ke dalam peta jalan tiga horizon. Dalam jangka pendek, satu sampai dua tahun, prioritasnya adalah membangun baseline yang dapat dipercaya. Pemerintah perlu memetakan jenis kejahatan ekonomi, sektor berisiko, modus, rantai aktor, kerugian, dan kapasitas penanganan. Pemetaan ini tidak boleh hanya berasal dari jumlah perkara karena angka perkara dipengaruhi intensitas penegakan. Data perlu menggabungkan temuan audit, anomali pengadaan, kepabeaian, perpajakan, transaksi keuangan, pengaduan, survei usaha, serta putusan pengadilan. Setiap indikator harus memiliki definisi, pemilik data, frekuensi pembaruan, dan keterbatasan.

Pada horizon yang sama, sejumlah kemenangan cepat dapat dipilih berdasarkan kombinasi nilai kerugian, peluang perbaikan, dan kesiapan data. Contohnya ialah transparansi pemilik manfaat dalam kontrak publik, analitik konflik kepentingan, pemeriksaan harga satuan yang tidak wajar, dan tindak lanjut rekomendasi audit. Kemenangan cepat penting untuk menunjukkan bahwa reformasi menghasilkan manfaat, tetapi pemilihan kasus tidak boleh didorong pencitraan. Target yang mudah dicapai dapat memperindah statistik tanpa menyentuh jaringan rente terbesar.

Dalam jangka menengah, tiga sampai lima tahun, fokus bergeser pada interoperabilitas kelembagaan dan perubahan insentif. Pertukaran data harus mengikuti protokol yang sah, aman, dan dapat diaudit. Pegawai pada posisi berisiko membutuhkan remunerasi yang wajar, rotasi berbasis risiko, pengawasan gaya hidup sesuai hukum, serta jalur karier yang melindungi profesionalisme. Dunia usaha memerlukan sistem perizinan yang lebih sederhana dan kepastian waktu layanan agar pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi penambahan prosedur.

Pada tahap menengah pula, kapasitas penyidikan keuangan dan analisis korporasi perlu ditingkatkan. Kejahatan modern jarang dilakukan melalui transaksi tunai sederhana. Ia melibatkan perusahaan afiliasi, instrumen digital, aset lintas yurisdiksi, kontrak kompleks, nominee, dan perantara profesional. Karena itu, penegak hukum membutuhkan keahlian akuntansi forensik, analitik jaringan, valuasi aset, perdagangan internasional, teknologi finansial, dan kerja sama lintas negara. Pendidikan profesi dan standar etik bagi akuntan, notaris, advokat, konsultan, serta penyedia jasa korporasi juga menjadi lapisan pencegahan.

Dalam jangka panjang, lima sampai sepuluh tahun, ukuran keberhasilan adalah terbentuknya keseimbangan baru. Perusahaan memperoleh keuntungan terutama melalui produktivitas dan inovasi, bukan perlindungan politik. Pejabat memiliki insentif karier untuk menjaga integritas. Warga melihat hukum diterapkan relatif setara. Sistem politik mampu membiayai kompetisi tanpa ketergantungan berlebihan pada rente kebijakan. Perubahan seperti ini tidak lahir dari satu operasi penindakan atau satu aplikasi, melainkan dari konsistensi lintas pemerintahan.

Peta jalan harus mempunyai papan kendali publik yang sederhana tetapi bermakna. Indikator masukan—anggaran, pegawai, aplikasi, rapat—tidak boleh mendominasi. Indikator proses dapat mencakup waktu pertukaran data dan penyelesaian perkara. Indikator keluaran mencakup rekomendasi yang ditindaklanjuti, aset yang dibekukan, dan kontrak yang dikoreksi. Indikator hasil mencakup penerimaan yang diselamatkan, penurunan harga berlebih, peningkatan jumlah peserta tender, aset yang benar-benar pulih, dan penurunan pengulangan pelanggaran. Indikator dampak mencakup produktivitas, investasi produktif, kepercayaan, kualitas layanan, dan ketimpangan peluang.

Untuk penelitian, agenda pertama adalah membangun indeks kejahatan ekonomi yang memisahkan prevalensi dari respons negara. Indeks prevalensi mencoba mengukur risiko atau skala pelanggaran, sedangkan indeks kapasitas respons mengukur deteksi, penindakan, dan pemulihan. Tanpa pemisahan ini, daerah yang aktif menindak dapat terlihat lebih buruk daripada daerah yang tidak menemukan apa pun karena pengawasannya lemah. Model pengukuran laten atau pendekatan Bayesian dapat membantu menggabungkan sinyal yang tidak sempurna.

Agenda kedua adalah menguji mekanisme, bukan hanya hubungan agregat. Penelitian dapat memeriksa apakah perbaikan integritas meningkatkan investasi melalui penurunan ketidakpastian, apakah pengadaan transparan meningkatkan kualitas infrastruktur, atau apakah pemulihan aset memperkuat layanan publik. Analisis mediasi perlu didukung urutan waktu dan asumsi kausal yang jelas. Studi kualitatif tentang bagaimana jaringan rente beradaptasi juga penting, karena pelaku dapat memindahkan modus ketika satu celah ditutup.

Agenda ketiga adalah menilai distribusi dampak. Penindakan yang sama dapat memengaruhi kelompok secara berbeda. Formalisasi perdagangan dapat melindungi penerimaan dan konsumen, tetapi membebani pedagang kecil jika prosedur legal terlalu mahal. Digitalisasi dapat mengurangi kontak langsung, tetapi mengecualikan wilayah dengan konektivitas lemah. Reformasi harus dinilai tidak hanya dari efisiensi, tetapi juga akses, keadilan, dan risiko pemusatan kekuasaan data.

Agenda keempat adalah membandingkan Indonesia dengan negara yang relevan, bukan sekadar negara maju. Perbandingan dengan negara berpendapatan menengah, negara kepulauan, ekonomi berbasis sumber daya, dan negara dengan desentralisasi dapat memberi pelajaran yang lebih sesuai. Tujuannya

bukan menyalin lembaga, melainkan memahami kondisi yang membuat reformasi bekerja: koalisi pendukung, kapasitas administratif, independensi hukum, teknologi, dan legitimasi.

Agenda terakhir adalah komunikasi publik. Narasi “perang melawan kejahatan ekonomi” mudah menghasilkan simbolisme dan dikotomi, sedangkan perubahan institusi memerlukan kesabaran. Publik perlu diberi penjelasan mengenai tujuan, hasil, biaya transisi, kegagalan, dan koreksi. Kepercayaan tumbuh bukan karena pemerintah selalu menyatakan berhasil, melainkan karena data dapat diperiksa, kesalahan diakui, dan kebijakan diperbaiki. Dengan demikian, ekonometrika bukan alat legitimasi keputusan yang sudah dibuat, melainkan sarana belajar bersama dari bukti.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. <https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369>
- Badan Pusat Statistik. (2026a, 5 Mei). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y)*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2575/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2026-tumbuh-5-61-persen--y-on-y-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026b, 1 Juli). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/07/01/2590/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-juni-2026-sebesar-3-34-persen-.html>
- Bank Indonesia. (2026, 22 Juli). *BI-Rate tetap 5,75%: Memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2814226.aspx
- Dreher, A., & Schneider, F. (2010). Corruption and the shadow economy: An empirical analysis. *Public Choice*, 144, 215–238. <https://doi.org/10.1007/s11127-009-9513-0>
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Polii, J. W. (2026). *Indonesia keluar dari jebakan kejahatan ekonomi (Analisis ekonometrika)* [Makalah tidak diterbitkan].
- Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). Shadow economies: Size, causes, and consequences. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 77–114. <https://doi.org/10.1257/jel.38.1.77>
- S&P Global Ratings. (2026, 13 Juli). *Indonesia ratings affirmed at “BBB/A-2”; outlook stable*. <https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3593443>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.